

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyebaran virus corona di tahun 2020 telah memberi dampak yang besar bagi seluruh dunia termasuk Indonesia. Berdasarkan data yang didapat dari situs resmi BNPB per 17 Mei 2020, 17.514 orang di Indonesia telah dinyatakan positif terkena covid-19 dengan keterangan 4.129 orang sembuh dan 1.148 meninggal dunia. Hal ini membuktikan bahwa telah lama virus corona menyebar di Indonesia namun belum juga ada jalan keluar yang efektif untuk menyelesaikan masalah pandemi ini. Akibat dari pandemi virus corona hampir seluruh masyarakat Indonesia terpaksa meminimalisir aktivitas di luar rumah yang menyebabkan banyak orang tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya dan harus mulai terbiasa untuk bekerja dari rumah. Hal ini tentu memengaruhi seluruh aspek kehidupan, mulai dari aspek ekonomi, pendidikan, perpajakan, dan lain-lain.

Apabila ditinjau dari sektor perpajakan, pandemi covid ini memberikan pengaruh besar terhadap penurunan penerimaan perpajakan di Indonesia dimana di tahun 2020 penerimaan perpajakan dalam APBN Indonesia hanya mencapai Rp 434,33 triliun. Angka realisasi ini lebih rendah 0,86% daripada di tahun 2019 yang mana penerimaan perpajakannya sebesar Rp438,09. Tentunya postur APBN yang

Tabel I.1 Data APBN tahun 2019 dan 2020

APBN (miliar rupiah)	2019				2020			
	APBN	Realisasi s.d. 30 April	% thd APBN	Growth (%)	Perubahan APBN	Realisasi s.d. 30 April	% thd Perubahan APBN	Growth (%)
A. Pendapatan Negara	2.165.111,8	532.333,2	24,59	0,81	1.760.883,9	549.509,3	31,21	3,23
I. Pendapatan Dalam Negeri	2.164.676,5	532.175,6	24,58	0,97	11.760.385,2	548.835,2	31,18	3,13
1. Penerimaan Perpajakan	1.786.378,7	438.089,3	24,52	5,13	1.462.629,7	434.331,6	29,70	- 0,86
2. PNBPN	378.297,9	94.086,3	24,87	- 14,74	297.755,5	114.503,7	38,46	21,70
II. Penerimaan Hibah	435,3	157,6	36,21	- 84,10	498,7	674,1	135,15	327,63

Sumber : APBN KITA Kemenkeu RI Edisi Mei 2020

mengalami defisit ini juga disebabkan karena APBD yang juga mengalami kerugian akibat dari pandemi. Adapun kerugian pada APBD disebabkan oleh belanja daerah yang meningkat pesat terutama untuk menjalankan kegiatan-kegiatan demi mengatasi pandemi covid-19. Begitu pula dari sisi pendapatan, lesunya perekonomian Indonesia juga memberikan dampak yang besar terhadap penurunan pendapatan dari pemerintah daerah. Pernyataan ini dibuktikan dengan data dari portal data postur APBD Kementerian Keuangan dimana realisasi pendapatan daerah terus menurun setiap tahunnya. Di tahun 2018 APBD mencatat realisasi pendapatan daerah dapat mencapai 101,45%, di tahun 2019 realisasi pendapatan daerah menurun menjadi 100,48%, di tahun 2020 sebesar 89,82%, dan di tahun 2021 realisasi pendapatan daerah hanya menyentuh angka 72,11%. Data ini merupakan data APBD murni dan realisasi APBD dihitung sampai dengan bulan September di tiap tahunnya. Dalam data di postur APBD juga dijelaskan mengenai rincian dari mana saja akun pendapatan daerah berasal disertai dengan besar anggaran, realisasi, dan persentasenya. Berdasarkan postur APBD dalam portal data DJPK Kementerian Keuangan, dapat diketahui bahwa pendapatan daerah dibagi menjadi PAD, TKDD, dan Pendapatan Lainnya.

Tabel I.2 Data APBD tahun 2018 sampai 2021

Akun Pendapatan Daerah	Anggaran/Pagu	Realisasi	%
2018	1.095.079,40	1.110.964,49	101,45
2019	1.192.632,60	1.198.407,26	100,48
2020	1.239.751,05	1.113.589,43	89,82
2021	1.155.600,89	833.313,20	72,11

Sumber : Portal Data APBD DJPK Kemenkeu

Dari ketiga pendapatan daerah tersebut, PAD merupakan indikator utama dalam menilai kemandirian daerah dalam mengelola keuangannya. Semakin mandiri sebuah daerah, maka akan semakin rendah tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat. Salah satu faktor penentu kemandirian dalam pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Retribusi seringkali dianggap sama dengan pajak daerah, akan tetapi pada kenyataannya retribusi dan pajak daerah merupakan dua hal yang berbeda. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan jasa atau pemberian izin khusus sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat mendapatkan kontraprestasi secara langsung atas pembayaran retribusi kepada daerah. Retribusi daerah sendiri ada banyak jenisnya dan setiap daerah memberlakukan retribusi daerah berbeda-beda sesuai dengan ketersediaan sumber daya masing-masing daerah. Tentunya hal ini juga berlaku di salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Purworejo.

Kabupaten Purworejo merupakan sebuah kota kecil yang terletak tidak jauh dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan seringkali disebut sebagai “Kota Pahlawan”. Apabila ditinjau dari segi pendapatan daerah di kabupaten ini, khususnya di bagian retribusi daerah, sesuai dengan data keuangan daerah dalam portal DJPK Kementerian Keuangan di tahun 2020, anggaran pendapatan terbesar jatuh kepada

retribusi pelayanan pasar yaitu sebesar 7.951.322.253. Angka ini tergolong cukup tinggi dan memiliki selisih yang besar dibandingkan anggaran jenis retribusi lain, padahal apabila dilihat sekilas realisasinya di masa pandemi ini belum pasti dapat mencapai target anggaran tersebut. Belum lagi di tanggal 14 April sampai 29 Mei 2020 Pemerintah Kabupaten Purworejo mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembebasan retribusi pelayanan pasar dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Purworejo nomor 160.18/224/220.

Tabel I.3 Data Anggaran Per Jenis Retribusi Tahun 2020 Kabupaten Purworejo

Anggaran Pendapatan Per Jenis Retribusi Tahun 2020 Kabupaten Purworejo	
Jenis Retribusi	Anggaran
RJUm-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	702.876.072
RJUm-Pelayanan Pemakaman dan Pengabyan Mayat	19.000.000
RJUm-Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	3.405.000.000
RJUm-Pelayanan Pasar	7.951.322.253
RJUm-Pengujian Kendaraan Bermotor	461.094.000
RJUm-Penyediaan dan/atau Penyeditan Kakus	20.500.000
RJUm-Pengendalian Menara Telekomunikasi	686.230.920
RJU-Pemakaian Kekayaan Daerah	897.600.350
RJU-Tempat Pelelangan	36.121.100
RJU-Terminal	273.821.000
RJU-Tempat Khusus Parkir	568.357.000
RJU-Rumah Potong Hewan	40.480.000
RJU-Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.558.665.561
RPT-Izin Mendirikan bangunan	710.411.350
RPT-Izin Trayek	40.050.000

Sumber : Portal Data Keuangan DJPK Kemenkeu

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar pasal 11 ayat 3, peninjauan kembali struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Hal ini dibuktikan

dengan dikeluarkannya beberapa Peraturan Bupati untuk memberikan pembebasan dan pengurangan retribusi pelayanan pasar sebagai solusi untuk para pedagang di masa pandemi yang mengakibatkan gangguan kehidupan dan penghidupan, dampak sosial dan ekonomi pada pedagang pasar daerah seperti Keputusan Bupati Nomor 160.18/283/2020 dan Keputusan Bupati Nomor 160.18/357/2021.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengupas lebih jauh dampak pandemi terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo, dampak kebijakan pengurangan dan pembebasan retribusi pelayanan pasar di masa pandemi bagi Dinas Pasar Baledono, solusi alternatif Dinas Pasar Baledono Kabupaten Purworejo dalam mengamankan penerimaan retribusi pelayanan pasar di masa pandemi dan sikap serta tanggapan para pedagang di Pasar Baledono Kabupaten Purworejo terhadap kebijakan pengurangan dan pembebasan retribusi pelayanan pasar yang dijalankan Dinas Pasar Baledono di masa pandemi. Pokok bahasan tersebut penting untuk mengetahui implementasi di lapangan dari kebijakan yang telah dijalankan oleh Dinas Pasar untuk mengukur tingkat pengamanan penerimaan retribusi pelayanan pasar di Pasar Baledono dengan mempertimbangkan kondisi pandemi. Selain itu, hasil penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui tanggapan dari para pedagang yang membayar retribusi terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. Tanggapan ini nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan strategi di masa mendatang. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk meneliti serta membahas lebih lanjut topik tersebut dan dituangkan ke dalam sebuah Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Dinas Pasar Baledono di

Kabupaten Purworejo dalam Mengamankan Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Masa Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah disajikan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain :

1. Bagaimana dampak pandemi terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo?
2. Bagaimanakah dampak kebijakan pengurangan dan pembebasan retribusi pelayanan pasar di masa pandemi bagi Dinas Pasar Baledono Kabupaten Purworejo?
3. Bagaimanakah solusi alternatif Dinas Pasar Baledono Kabupaten Purworejo dalam mengamankan penerimaan retribusi pelayanan pasar di masa pandemi?
4. Bagaimanakah sikap dan tanggapan para pedagang di Pasar Baledono Kabupaten Purworejo terhadap kebijakan pengurangan dan pembebasan retribusi pelayanan pasar yang dijalankan Dinas Pasar Baledono di masa pandemi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dampak pandemi terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar pada Dinas Pasar Baledono di Kabupaten Purworejo
2. Mengetahui dampak kebijakan pengurangan dan pembebasan retribusi pelayanan pasar di masa pandemi bagi Dinas Pasar Baledono

3. Mengetahui solusi alternatif Dinas Pasar Baledono Kabupaten Purworejo dalam mengamankan penerimaan retribusi pelayanan pasar di masa pandemi
4. Mengetahui sikap dan tanggapan para pedagang di Pasar Baledono Kabupaten Purworejo terhadap kebijakan pengurangan dan pembebasan retribusi pelayanan pasar yang dijalankan Dinas Pasar Baledono di masa pandemi.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis hanya berfokus kepada penerimaan retribusi pelayanan pasar di wilayah Kabupaten Purworejo. Secara lebih spesifiknya, penulis telah meneliti dampak pandemi terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar di salah satu pasar di Kabupaten Purworejo yaitu Pasar Baledono yang datanya diambil dari sudut pandang pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan mempertimbangkan masa pandemi yang terjadi, penulis membatasi data pada rentang tahun 2019-2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dapat tersampaikan kepada pembaca Karya Tulis Tugas Akhir ini, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan Karya Tulis Tugas Akhir ini yaitu sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan dan retribusi daerah serta memberikan wawasan bagi pembaca dalam memahami retribusi pelayanan pasar.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir, yaitu :

1.5.2.1 Penulis

Menambah wawasan penulis seputar retribusi pelayanan pasar, pengaruh pandemi terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar, serta solusi yang dapat dipertimbangkan untuk mengamankan retribusi tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pembandingan antara teori yang dipelajari oleh penulis di bangku perkuliahan dan pelaksanaannya di lapangan.

1.5.2.2 Pemerintah Daerah

Sebagai sarana evaluasi untuk melaksanakan kebijakan di bidang retribusi dengan lebih baik ke depannya serta menampung pesan masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk mengatur kebijakan di masa yang akan datang.

1.5.2.3 Masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang retribusi pelayanan pasar beserta pengaruh pandemi terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar dan meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pedagang di pasar untuk lebih taat membayar retribusi pelayanan pasar.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori yang akan digunakan sebagai dasar landasan berpikir penulis untuk menunjang pembahasan dari rumusan masalah. Teori yang digunakan juga berkaitan dengan objek penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode serta langkah-langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian. Pembahasan berisi data yang didapatkan dari berbagai metode pengumpulan data yang telah dilaksanakan serta hasil interpretasi data tersebut untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi simpulan dari pembahasan yang telah dilaksanakan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.